

**20
22**

Laporan Kinerja

**DINAS PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



KATA PENGANTAR

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2021. Laporan ini merupakan laporan akhir dari Renstra 2021-2026 dan awal dari Renstra Dinas Pariwisata 2021-2026.

Terdapat beberapa tujuan laporan ini dibuat antara lain, sebagai perbandingan rencana dan target yang telah disusun awal perencanaan dengan realisasi yang telah dicapai. Berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan juga Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.

Diharapkan bisa menjadi alat penilai kinerja secara kuantitatif, bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan demi terwujudnya Kalimantan Utara sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing. Selain itu, menjadi wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja pada proses pelaksanaan pada tahun anggaran selanjutnya.

Berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara ini dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya sesuai kewenangan yang dimiliki. Demikian laporan ini disampaikan, terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
DAFTAR LAMPIRAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Dasar Hukum	4
1.2. Aspek Strategis Organisasi	6
1.3. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	7
1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
1.5. Struktur Organisasi.....	14
1.6. Sumber Daya Manusia.....	15
1.7. Sarana dan Prasarana	18
II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
1.1. Rencana Strategis	21
1.1.1. Tujuan.....	21
1.1.2. Sasaran	21
1.1.3. Strategi dan Kebijakan	23
1.8. Penetapan Kinerja Tahun 2021	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	27
3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	31
3.3.1. Capaian sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri	32
3.3.2. Capaian Sasaran Rata-rata lama tinggal wisatawan	33
3.3.3. Evaluasi dan Analisis Sasaran	33
3.3.4. Evaluasi dan Analisis Sasaran	39
3.4. Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV PENUTUP	49

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara;
2. Mendorong Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum Pembentukan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara ialah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara:5/237/2016);
8. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara).

Dasar Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP):

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pem-berantasan KKN;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan LKjIP;
9. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Provinsi Kalimantan Utara merupakan sebuah provinsi yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya dengan memiliki keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahmatan pelayanan. Karakteristik Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda ditandai dengan melimpahnya sumber daya alam yang melimpah. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut, perlu mengedepankan pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Peran dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara sangat penting dalam rangka mendorong terselenggaranya visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan telaah terhadap tiga misi tersebut, maka Dinas Pariwisata secara langsung menunjang pencapaian Misi ke-6: Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota.

Misi ke-6 dalam RPJMD dijabarkan ke dalam upaya-upaya yang mendukung pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan visi Kalimantan Utara yang berubah, maju dan sejahtera. Oleh karena itu dirumuskan berbagai hal yang harus dilakukan untuk menjabarkan misi

ke-6 ini, antara lain bagaimana pengelolaan pariwisata maupun ekonomi kreatif yang berkualitas dan memiliki daya saing, pemanfaatan bahan lokal sebagai produk unggulan daerah yang layak jual, proses pelayanan di bidang pariwisata/ekonomi kreatif yang memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Tujuan yang ada di misi ke-6 ini sesuai dengan Dinas Pariwisata yaitu kemampuan usaha pariwisata/ekonomi kreatif dalam memberikan pelayanan terbaik dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas sehingga tercipta kemandirian sebagai mesin ekonomi penghasil devisa dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara.

1.3. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah, kebijakan nasional (dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata), dan dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi). Berikut ini uraian selengkapnya. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Permasalahan tersebut terjabarkan sebagai berikut:

- 1. Rendahnya kunjungan wisata ke Kalimantan Utara**

Rendahnya kunjungan wisata ini disebabkan sarana promosi ini karena baru terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri, dan baru terbentuknya SKPD khususnya di Bidang Pariwisata. Sehingga kunjungan wisata ke Kalimantan Utara belum sebanyak dibanding Provinsi Lain terutama Kalimantan Timur sebagai induk dari wilayah Kalimantan Utara;

- 2. Masih rendahnya investasi di bidang pariwisata di Kalimantan Utara.**

Kalimantan Utara menjadi primadona bagi investor dalam hal sumber daya alamnya di bidang batubara, minyak dan perkebunan. Keberpihakan investor pada bidang kepariwisataan perlu didukung untuk diyakinkan bahwa kepariwisataan dapat bersinergi dengan sumber daya alam lainnya yang ada di Kalimantan Utara dan nantinya diharapkan dapat mengganti keberadaan batubara, minyak dan perkebunan.

3. Rendahnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif

Dari indeks daya saing pariwisata, Kalimantan Utara terbilang masih termasuk rendah. Tampak dari kondisi pilar-pilar pariwisata, yang pertama *Healthy and Hygiene* (kesehatan dan kebersihan) masih belum terpenuhi secara maksimal. Contohnya fasilitas toilet di beberapa tempat wisata masih kurang bersih, bahkan belum tersedia secara layak. Kedua, *Safety and Security* (keselamatan dan keamanan) yang masih rendah.

Kemudian *Environmental Sustainability* (keberlanjutan lingkungan) masih perlu diperhatikan. Sebagian besar wilayah Provinsi Kaltara merupakan Kawasan hutan baik berupa hutan yang berfungsi lindung maupun hutan produksi. Oleh karena itu Kaltara salah satu provinsi di Indonesia yang masuk bagian *Heart of Borneo* (HoB) bersama Brunei Darussalam dan Malaysia sebagai kawasan penting untuk konservasi keanekaragaman hayati dan penerapan prinsi pembangunan berkelanjutan. Diharapkan pengelolaan Kawasan HoB dilakukan secara bijak untuk keberlanjutan manfaat hutan bagi generasi saat ini dan mendatang. Terakhir *Tourist Service Infrastructure* (infrastruktur pelayanan wisatawan) yang masih kurang. Contohnya ketersediaan *Tourism Information Centre* (TIC) masih sedikit di setiap obyek wisata guna membantu wisatawan untuk tahu informasi-informasi penting terkait sarana dan prasarana pariwisata di Kalimantan Utara.

Daya saing SDM pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tidak banyak yang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Pelaku pariwisata yaitu tenaga kerja pariwisata atau pelaku usaha pariwisata (restoran, spa, salon, hotel) masih banyak belum memiliki sertifikat profesi maupun sertifikat usaha. Sedangkan SDM ekonomi kreatif banyak belum paham regulasi untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual dari hasil produk mereka. Oleh karena itu, perlunya transfer ilmu, profesionalisme, kompetensi dan pendidikan yang baik agar mampu bersaing dengan baik.

4. Aksesibilitas transportasi menuju obyek wisata di Kalimantan Utara kurang memadai.

Pada dasarnya salah satu alasan wisatawan mengunjungi suatu obyek wisata adalah karena mudahnya menjangkau kawasan atau obyek. Kalimantan Utara

mempunyai daerah atau kawasan yang sangat luas dan terkendala transportasi umum yang belum lancar dan terhubung antara daerah satu dengan lainnya secara mudah dan murah.

5. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pada obyek wisata di Kalimantan Utara

Ketersediaan sarana prasarana ini menyangkut kenyamanan dan penyediaan sesuatu yang tertata baik untuk memenuhi kebutuhan wisatawan akan kenangan dan keindahan (sapta pesona) dalam menikmati obyek wisata.

6. Belum optimalnya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif

Pemasaran dan promosi adalah suatu usaha memperkenalkan kepada calon wisatawan dan juga calon investor untuk mengenal Kalimantan Utara dibidang budaya dan wisatanya, ini merupakan usaha dengan biaya yang tidak sedikit juga tidak bisa langsung dapat dilihat imbasnya. Perlu adanya kesinambungan dan kontinuitas serta kreatifitas agar budaya dan wisata Kalimantan Utara dapat diterima selain itu daerah lainnya juga semakin bersolek dalam hal perebutan calon wisatawan dan calon investornya. Selain itu perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperdagangkan hasil produk daerah melalui *e-commerce* untuk memasarkan komoditas wilayah.

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Dinas pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Destinasi Pariwisata;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pemasaran Pariwisata;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dari masing-masing struktur dalam organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara dapat diuraikan masing-masing dalam Tabel berikut:

Tabel 1.1 Uraian Jabatan dan Tugas Pokok Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara

Jabatan	Tugas Pokok
Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> a. Merencanakan anggaran dan program (Renstra, RKA/DPA, dan Renja) Dinas Pariwisata jangka pendek, menengah dan jangka panjang sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; b. Merencanakan kebijakan teknis kepariwisataan yang meliputi kesekretariatan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, serta industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia serta tugas pokok dan fungsinya agar mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; c. Merencanakan solusi pemecahan terhadap permasalahan pariwisata yang meliputi kesekretariatan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, serta industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia serta tugas pokok dan fungsinya agar mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; d. Merencanakan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, serta industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia;

Jabatan	Tugas Pokok
	<ul style="list-style-type: none"> e. Merencanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai tugas pokok dan fungsinya agar mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; f. Merumuskan pedoman kerja dinas pariwisata berdasarkan program kerja agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja g. Mengendalikan pelaksanaan tugas ketatausahaan biro dan teknis operasional urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelayanan informasi dinas serta pengelolaan barang dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; h. Menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif serta industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia baik dari dalam maupun luar negeri sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja i. Mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata yang meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, serta industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia dengan instansi/unit kerja terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana tugas dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur sehubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan bidang pariwisata; l. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing; m. Membina bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan bahan rencana anggaran dan program kerja (RKA) kesekretariatan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar keterpaduan dan keserasian kerja b. Merumuskan bahan/telaahan staf kerjasama dengan instansi terkait pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif serta industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia baik dari dalam maupun luar negeri sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan c. Merumuskan bahan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesekretariatan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik; d. Merumuskan bahan penyusunan standar, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesekretariatan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai rencana; e. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; f. Mengkoordinasikan penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan di dinas pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dinas pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

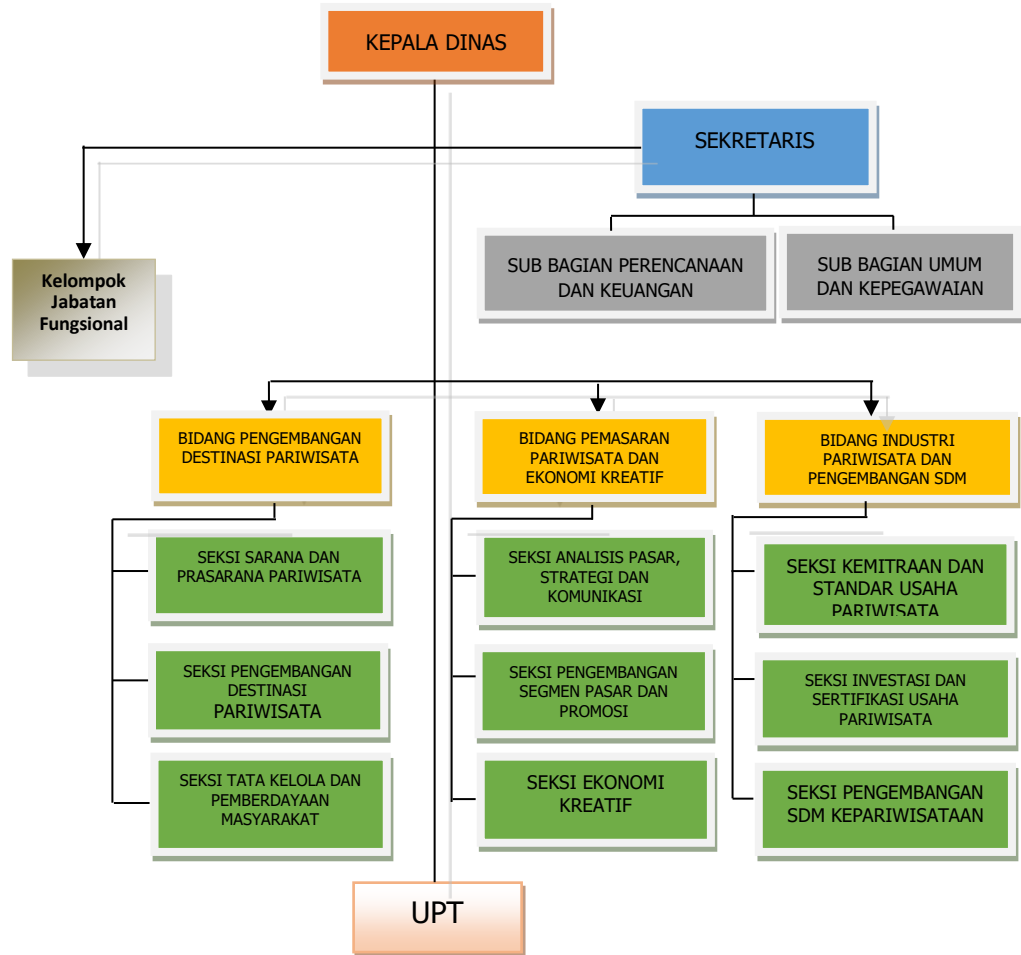
Jabatan	Tugas Pokok
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> h. Memantau urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat dinas pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik; i. Memantau kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; j. Menginventarisir setiap permasalahan yang dihadapi pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Kalimantan Utara guna mencari solusi pemecahannya sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara optimal; k. Menginventarisir penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja dan rencana anggaran (Renstra, Renja, RKA/DPA) Dinas Pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; l. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi di bidang kesekretariatan dan pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik; m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal; n. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing; o. Membina bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan bahan rencana anggaran dan program kerja pengembangan destinasi pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Merumuskan bahan-bahan fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; c. Merumuskan bahan rencana kinerja bidang pengembangan destinasi pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; d. Merumuskan bahan koordinasi untuk mengembangkan destinasi pariwisata dengan instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; e. Merumuskan bahan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; f. Merumuskan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman petunjuk operasional di bidang pengembangan destinasi pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; g. Merumuskan bahan kebijakan teknis penyusunan dan penyelenggaraan manajemen kepariwisataan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; h. Merumuskan bahan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengembangan destinasi pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; i. Merumuskan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan destinasi pariwisata sebagai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

Jabatan	Tugas Pokok
Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan guna dicarikan solusi pemecahanannya yang berhubungan dengan pengembangan destinasi pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
	k. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
	l. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik;
	m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.
	a. Merumuskan bahan rencana anggaran dan program kerja (RKA) bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja
	b. Merumuskan bahan pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan terpadu antar/dengan kabupaten/kota dan <i>stakeholder</i> pariwisata lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik
	c. Merumuskan bahan-bahan terkait pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas
	d. Merumuskan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja
	e. Merumuskan kebijakan teknis terkait analisis pasar, strategi dan komunikasi, pengembangan segmen pasar dan promosi, serta ekonomi kreatif sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja
	f. Merumuskan bahan kegiatan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi serta lembaga-lembaga pariwisata seperti ASITA, PHRI, HPI, PUTRI dan instansi-instansi terkait baik di dalam maupun luar negeri dalam upaya meningkatkan kemitraan untuk pengembangan pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sebagaimana telah direncanakan
	g. Merumuskan bahan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja
	h. Mengembangkan dan memantau pusat informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja
	i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan solusi pemecahanannya yang berhubungan dengan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
	j. Mengembangkan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam dan luar negeri sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
	k. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
	l. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik
	m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Bidang Industri Pariwisata	a. Merumuskan bahan rencana anggaran dan program kerja (RKA) bidang industri jasa dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja

Jabatan	Tugas Pokok
dan Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> b. Merumuskan bahan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan di bidang industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja c. Merumuskan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya agar mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja d. Merumuskan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama terkait industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia antar <i>stakeholder</i> baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai tugas pokok dan fungsinya agar mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja e. Merumuskan bahan fasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja f. Merumuskan bahan kegiatan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi terkait baik di dalam maupun luar negeri dalam upaya meningkatkan industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik g. Merumuskan bahan kebijakan teknis penyusunan dan penyelenggaraan industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik h. Merumuskan bahan laporan pertanggungjawaban kegiatan industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik i. Merumuskan bahan pengawasan industri pariwisata (pertunjukkan grup kesenian, usaha perhotelan, rumah makan, bar, restoran, gelanggang, taman rekreasi, taman laut, pemandian alam dan pondok wisata) sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan guna dicarikan solusi pemecahannya yang berhubungan dengan industri jasa pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya agar mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; k. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing l. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Jumlah sumber daya manusia

1.6. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Pada tahun 2021 Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara memiliki pegawai sebanyak 30 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 13 orang tenaga honorer (pegawai tidak tetap) sehingga total sumber daya manusia yang dimiliki adalah 43 personel. Pada saat ini, jabatan Kepala Dinas ditugaskan pada pejabat Sekretaris sebagai Plt. Kepala Dinas..

Pemetaan pegawai berdasarkan bidang pada Dinas Pariwisata dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah sumber daya manusia

JABATAN	JUMLAH
KEPALA DINAS	0
SEKRETARIS	1
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	7
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	6
BIDANG INDUSTRI PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN SDM	6
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	6
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	4
PEGAWAI TIDAK TETAP	13

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, 2021

1. Berdasarkan Golongan

Data ASN Menurut Golongan, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara memiliki pegawai sebanyak 3 orang di Golongan II, 19 orang di Golongan III, dan 9 orang di Golongan IV. Rincian data ASN menurut golongan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Data ASN Menurut Golongan

NO	UNIT JABATAN	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	3	3
4.	Kepala Seksi	-	-	6	3	9
5.	Kepala Sub Bagian	-	-	1	1	2
6.	Pelaksana	-	3	12	0	15
	JUMLAH	0	3	19	8	30

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, 2021

2. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Terlihat pada tabel 1.4. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, untuk ASN Dinas Pariwisata yang paling tinggi tingkat pendidikannya yaitu pada tingkatan S₃. Pada tingkatan pendidikan S₃ sebanyak 1 orang, S₂ total 7 orang, pendidikan S₁ sebanyak 17 orang, pendidikan D₃ sebanyak 4 orang dan pendidikan SMA sebanyak 1 orang. Kemudian untuk pegawai tidak tetap tingkat pendidikan yang paling tinggi yaitu S₁ dengan jumlah sebanyak 5 orang, pendidikan D₃ sebanyak 1 orang dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 7 orang.

Tabel 1.4 Data ASN dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan kualifikasi pendidikan

NO	UNIT JABATAN	S ₃	S ₂	S ₁	D ₃	SMA	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	1	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	2	1	-	-	3
4.	Kepala Seksi	1	4	2	1	1	9
5.	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	-	2
6.	Pelaksana	-	-	12	3	-	15
7.	Pegawai Tidak Tetap	-	-	5	1	7	13
	JUMLAH	1	7	22	5	8	43

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, 2021

3. Berdasarkan Eselon

Berdasarkan data pada tabel 1.5. Data ASN menurut eselon, Eselon II berjumlah 1 orang, Eselon III berjumlah 4 orang, Eselon IV 11 orang, serta Non Eselon 15 orang.

Tabel 1.5 Data ASN Menurut Eselon

NO	UNIT JABATAN	ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	NON ESELON	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	3	-	-	3
4.	Kepala Seksi	-	-	-	9	-	9
5.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	2	-	2
6.	Pelaksana	-	-	-	-	15	15
	JUMLAH		-	4	11	15	30

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, 2021

1.7. Sarana dan Prasarana

Untuk inventaris barang Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara masih menggunakan beberapa aset pinjam pakai dan terdaftar pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Data Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	WARNA	MERK
1	Papan Nama Instansi	1	Paket	2017	Putih	-
2	Buku Laporan dan Lain-lain	1	Paket	2017	-	-
3	Laptop	6	Buah	2017	Merah dan Hitam	Asus
4	Personal Komputer	7	Buah	2017	Putih	Hp
5	Peti Uang (Brankas)	1	Buah	2017	Abu-Abu	Ichiban
6	Alat Penghancur Kertas	1	Buah	2017	Hitam	Aurora
7	Mesin Absensi	1	Buah	2017	Putih-Hitam	Solution
8	Personal Komputer	1	Buah	2017	Putih	Mac
9	Camera DSLR	1	Buah	2017	Hitam	Nikon
10	Monopod	1	Buah	2017	Hitam	Nikon
11	Tas Kamera	1	Buah	2017	Hitam	Nikon
12	Dry Box	1	Buah	2017	Hitam	Nikon
13	Toolkit Cleaning	1	Buah	2017	Kuning	Nikon
14	Kabel Shutter	1	Buah	2017	Hitam	Nikon
15	Flash GN700	2	Buah	2017	Hitam	Nikon
16	Reicievier Flash	2	Buah	2017	Hitam	Nikon
17	Memory Camera	2	Buah	2017	-	Toshiba
18	Filter ND 32	1	Buah	2017	-	Nikon
19	Filter ND 64	1	Buah	2017	-	Nikon
20	Filter Gradiasi	1	Buah	2017	-	Nikon
21	Mirrorless	1	Buah	2017	Hitam	Nikon
22	Tripod	1	Buah	2017	Hitam	Nikon
23	Lensa Tele	1	Buah	2017	Hitam	Nikon
24	Lensa Wide	1	Buah	2017	Hitam	Nikon
25	Lensa Fix	1	Buah	2017	Hitam	Nikon
26	Kamera Under Water	2	Buah	2017	Hitam	Sealife
27	Go-Pro	4	Buah	2017	Abu-abu Kehitaman	-
28	Drone	1	Buah	2017	Silver-Hitam	DJI
29	Printer Inkjet	4	Buah	2017	Hitam	Epson L120
30	Printer CMYK (All In One)	3	Buah	2017	Hitam	Epson
31	Printer RGB (All In One)	4	Buah	2017	Hitam	Canon
32	UPS	2	Buah	2017	Hitam	APS

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	WARNA	MERK
33	Telepon	1	Buah	2017	Hitam	Panasonic
34	Televisi	1	Buah	2017	Hitam	Samsung
35	Gorden	1	Paket	2017	Hijau	-
36	Mobil	1	Buah	2017	Hitam	Hilux Diesel
37	Motor	10	Buah	2017	Hijau Doff	Yamaha
38	AC Unit 1 PK	4	Paket	2017	Putih	Samsung dan Panasonic
40	AC Unit 2 PK	1	Paket	2017	Putih	Samsung
41	Mesin Penghitung Uang	1	Paket	2017	Putih	Tori
42	Slide Projector	1	Paket	2017	Hitam	-
43	Lemari Berkas	6	Buah	2017	Abu-abu	-
44	CCTV	1	Paket	2017	Putih	HK Vision
45	Mesin Ketik Manual	1	Buah	2017	Putih	Olympia
46	Laptop	3	Buah	2020	Silver	Hp
47	Penanak Nasi	1	Buah	2020	Putih	MASPION
48	Printer	1	Buah	2020	Putih	Fuji Xerox
49	Laptop	2	Buah	2020	Putih	ASUS
50	PC	5	Buah	2020	Putih	Hp
51	Mobil	1	Buah	2020	Brownzmika Metalik	RUSH
52	Mobil	1	Buah	2020	Putih	HILUX
53	Motor	1	Buah	2020	Silver	Hp
54	Stabilizer	3	Buah	2020	Hitam	Yujitzu
55	Camera Mirrorless	1	Buah	2020	Putih	Fuji Xerox
56	Laptop	2	Buah	2020	Putih	ASUS
57	Handheld Smartphone Gimbal	3	Buah	2020	Abu-Abu	Dji Osmo Mobile 2
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	2021		Meubelair / HPL
59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	2021		EPSON / L120
60	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1	Buah	2021		-
61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Buah	2021		EPSON / L- 6170
62	Laptop	3	Buah	2021		DELL / LATITUDE 3410
63	Laptop	1	Buah	2021		Asus / TUF F15
64	Laptop	1	Buah	2021		LENOVO / YOGA SLIM 7 14ITL05

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	WARNA	MERK
65	Kamera Stile	2	Buah	2021		LOGITECH / BCC950
66	Condensor	2	Buah	2021		MICROPHONE/ FANTECH LEVIOSA MCX01
67	Sound System	2	Buah	2021		SPEAKER LOGITECH Z213
68	Lemari Kayu	1	Buah	2021		LOKAL/HPL
69	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Buah	2021		HPL / CUSTOM

II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1.1. Rencana Strategis

1.1.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, sejumlah tujuan diupayakan pencapaiannya guna berkontribusi pada visi tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara yaitu,

“Mewujudkan ekonomi daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing”

1.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 tersebut, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara
2. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara
3. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi awal	Target awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan ekonomi daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara	Persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara	-34	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara	Persentase pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara	-7,5	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	Tingkat Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,45 Hari	1,48 Hari	1,53 Hari	1,54 Hari	1,54 Hari	1,55 Hari	1,55 Hari

1.1.3. Strategi dan Kebijakan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara ini ialah sebagai dokumen perencanaan yang bersifat mengikat bagi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan program kerja dan indikator kinerja sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk periode lima tahun ke depan.

Secara lebih mendetail terkait koneksitas atas tujuan, strategi dan kebijakan-kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel 2.2. Indikator kinerja sudah memuat pencapaian target kinerja yang harus dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan (2021-2026). Target tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata sekaligus mengevaluasi kinerja yang umumnya tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG BERDAYA SAING	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara	Persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara	Meningkatkan pembangunan destinasi wisata	- Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur obyek wisata
	Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara	Persentase pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara	Memperluas jaringan pemasaran dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif	- Meningkatkan Informasi dan Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan dan teknologi digital - Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pariwisata
	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	Tingkat Rata-rata lama tinggal wisatawan	Meningkatkan jumlah produk pariwisata dan ekraf yang terdaftar kekayaan intelektualnya	- Mengembangkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata serta Ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing - Meningkatkan pelatihan dan sosialisasi pada pelaku pariwisata dan ekraf - Meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif - Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat untuk sadar wisata

1.8. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Proses penjabaran sasaran dan program dari Rencana Strategis 2021-2026 yang telah ditetapkan akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Tahunan yaitu termasuk Perjanjian Kinerja yang terukur. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator keberhasilan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara yang harus ada dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara.

Penyusunan rencana ini dilakukan seiring dengan penyusunan kebijakan anggaran, oleh karena itu setelah anggaran ditetapkan maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang merupakan komitmen dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapainya pada tahun tersebut. Adapun perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan
Utara**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara	Persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara	10%
2	Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara	Persentase pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara	10%
3	Meningkatnya Rata-rata lama tinggal wisatawan	Tingkat Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,53

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian kinerja dalam laporan kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi semakin tinggi realisasi semakin menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, menggunakan rumus:

$$\text{Presentasi pencapaian rencana tingkat capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Interval nilai dan kriteria penilaian pencapaian kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Skala nilai peringkat kinerja (sumber : Permendagri 54 Tahun 2010)

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq$	Sangat Baik	
2	76 - 90	Tinggi	
3	66 - 75	Sedang	
4	51 - 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Tahun 2021 merupakan tahun keempat periode RPJMD dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara dengan capaian Kinerja terhadap target yang telah tercapai tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara	Persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara	10%	-16,09%	-26%
2	Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara	Persentase pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara	10%	28,57%	286%
3	Meningkatnya Rata-rata lama tinggal wisatawan	Tingkat Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,53 Hari	1,35 Hari	88%

Keterangan:

	= Sangat Baik
	= Tinggi
	= Sangat Rendah

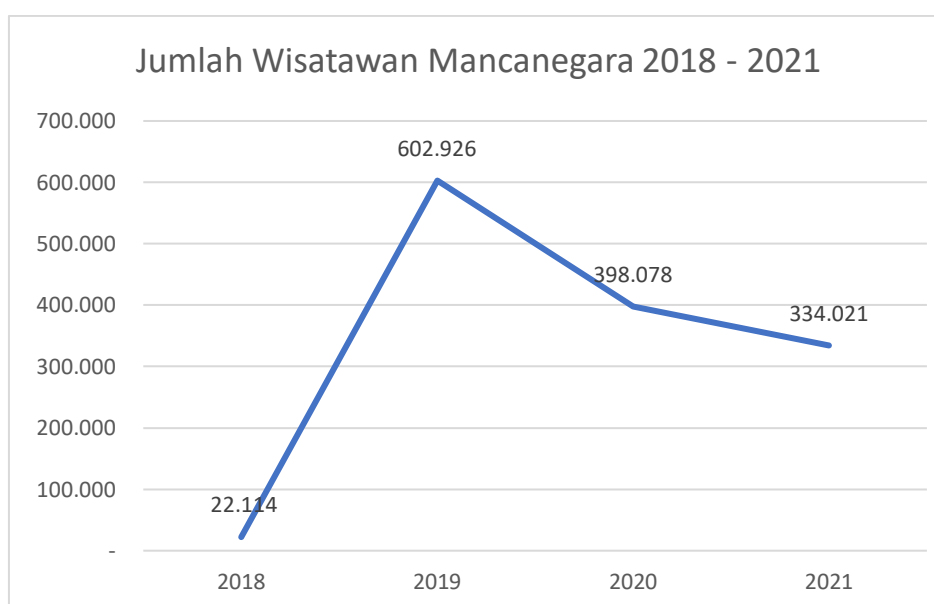
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi atau capaian bervariasi. Pertama dari peningkatan jumlah wisatawan, data wisatawan didapatkan dari data yang diberikan oleh Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dan BPS Provinsi Kaltara. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kalimantan Utara pada tahun 2021 sebanyak 334.021 kunjungan. Angka jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kalimantan Utara tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode *Mobile Positioning Data* (MDP), hal ini dilakukan karena terdapat jumlah wisman yang berkunjung ke Kalimantan Utara berdasarkan Pintu Lintas Batas (PLB) tidak tercatat (*undocumented*) di Imigrasi seperti pada pintu-pintu yang tidak resmi sehingga Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Telkomsel (perusahaan operator telekomunikasi seluler) melakukan penghitungan dengan menggunakan metode MDP tersebut. Jumlah wisman diperoleh berdasarkan pintu masuk Nunukan, Long Bawan dan Lainnya (Wisman *undocumented*) sedangkan tidak terdapat kunjungan wisman berdasarkan pintu masuk kota Tarakan. Rekapitan

jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kalimantan Utara pada tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Jumlah Kunjungan Wisatawan		
Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara
2018	22.114	476.630
2019	602.926	343.446
2020	398.078	239.782
2021	334.021	308.298

Tabel 3.3 Jumlah kunjungan wisman dan wisnus tahun 2018-2021

Dapat diketahui penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2021 yaitu sejumlah 334.021 kunjungan dari tahun 2020 sebesar 398.078 kunjungan. Terlihat jelas bahwa realisasi menurun dari target yang telah ditetapkan yaitu menargetkan pertumbuhan wisatawan mancanegara sebesar 10%. Semenjak dinyatakan sebagai pandemi global pada bulan Maret tahun 2020 oleh World Health Organization (WHO), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus menunjukkan penurunan angka kunjungan. Sehingga sebagian besar faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah wisatawan mancanegara pada Kalimantan Utara disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang sedang dialami baik di nasional maupun di Kalimantan Utara sendiri.

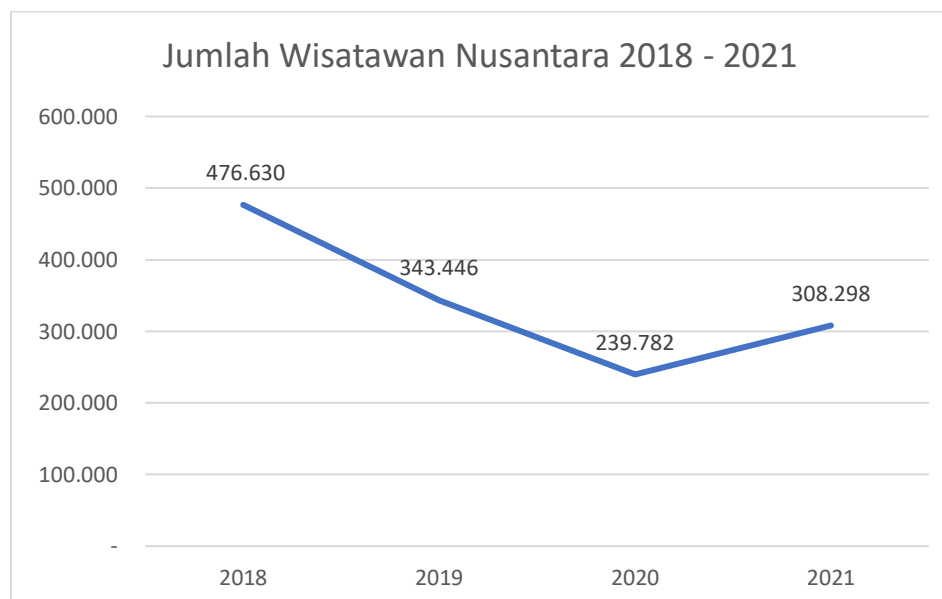


Grafik Jumlah Wisatawan Mancanegara Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2021

Adanya pandemi COVID – 19 selain menyebabkan suatu negara menerapkan karantina wilayah (lockdown) juga membuat pemerintah menerapkan kebijakan

protokol kesehatan yang ketat sebagai persyaratan yang harus dilalui seorang wisatawan untuk berkunjung. Khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, dalam menangani pandemi COVID – 19, Negara Malaysia memberlakukan Movement Control Order (MCO) atau perintah kendali pergerakan Malaysia sehingga turut mempengaruhi penurunan angka wisatawan mancanegara tersebut.

Selanjutnya sasaran kedua, Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Dimana target tahun 2021 adalah Persentase pertumbuhan sebanyak 10% dan realisasi Persentase pertumbuhan sebanyak 28,57% sehingga capaiannya sebesar 285% dengan kategori capaian sangat baik. Grafik jumlah wisatawan nusantara tahun 2018-2021 dapat disimak pada gambar berikut:



Dari grafik diatas dapat diketahui peningkatan jumlah wisatawan nusantara di Kalimantan Utara dari tahun 2020 sebesar 255.516 kunjungan menjadi 319.901 kunjungan pada tahun 2021. Keberhasilan dalam mencapai target diantaranya merupakan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan. Selain hal tersebut, faktor pendukung ialah kegiatan vaksinasi dan bantuan sosial dari pemerintah serta arahan untuk menggunakan produk lokal khas dari Kalimantan Utara membuat perekonomian Kalimantan Utara semakin bertumbuh seiring dengan pengendalian COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak khusus semenjak tahun 2020 pada sektor pariwisata di Kalimantan Utara. Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah yang juga diharapkan dapat

memberikan multiplier effect bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata seperti industri kerajinan dan souvenir, jasa biro perjalanan, hotel dan penginapan, dan lain-lain. Berkembangnya pariwisata maka akan semakin meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung.

Pada sasaran ketiga, yaitu rata-rata lama tinggal wisatawan realisasi masuk pada kategori tinggi yang tergolong sudah cukup baik untuk mencapai target. Hal ini disebabkan masih kondisi pandemi sehingga rata lama tinggal wisatawan masih tergolong cukup dibandingkan dengan target yang ingin dicapai. Dibanding dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan rata-rata lama. Pada tahun sebelumnya lebih tinggi karena dipengaruhi penerapan karantina mandiri yang tinggi.

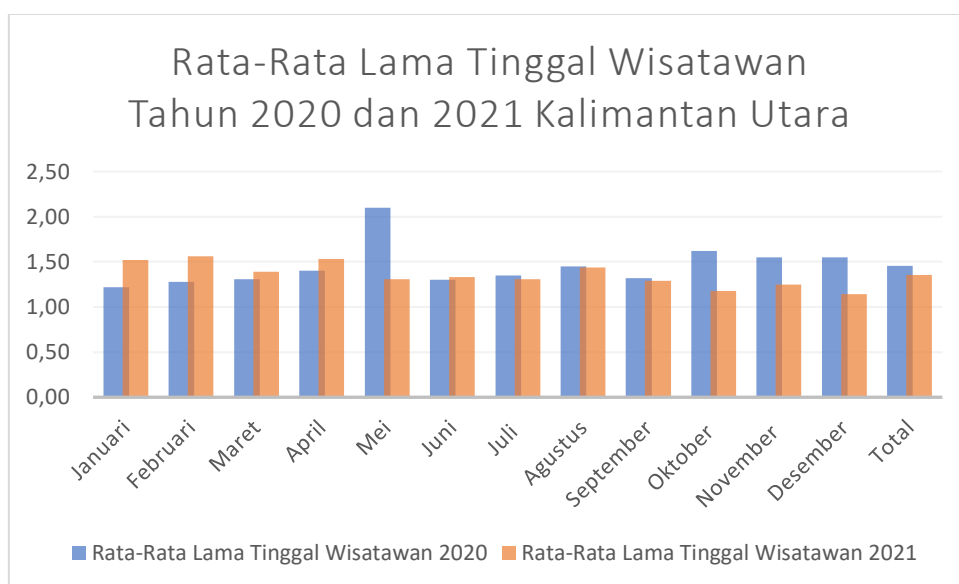
Wisatawan memerlukan tempat tinggal sementara (akomodasi) yang akan digunakan sebagai rumah sementara, dan makanan selama berada di luar rumah tempat tinggal tetapnya atau selama perjalanan wisata. Beberapa faktor yang mempengaruhi lama tinggal wisatawan pada suatu daerah diantaranya adalah faktor dari tempat wisata yaitu fasilitas, tata laksana (pelayanan, keamanan, serta kenyamanan), tipe akomodasi yang tersedia, dan faktor dari wisatawan adalah alasan berwisata dan asal wisatawan yaitu untuk berekreasi (cometer, imigran) dan untuk berkegiatan bisnis profesional (pegawai, transit passsager). Rata-rata lama tinggal wisatawan berdasarkan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Rata-rata lama tinggal wisatawan 2021

Bulan	Wisnus (Hari)	Wisman (hari)	Total
Januari	1.51	4.47	1.52
Februari	1.57	10,00	1.56
Maret	1.38	3.07	1.39
April	1.53	1.36	1.53
Mei	1.31	1.63	1.31
Juni	1.33	2.13	1.33
Juli	1.31	1.63	1.31
Agustus	1.44	1,50	1.44
September	1.29	1.21	1.29
Oktober	1.18	1,00	1.18
November	1.25	1.33	1.25
Desember	1.14	1,00	1.14
Total	1.35	2.50	1.35

Walaupun rata-rata lama tinggal tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, tetapi terdapat beberapa bulan yang tercatat adanya kenaikan jumlah rata-rata lama menginap seperti pada bulan Januari sebesar 1.52 hari, Februari sebesar 1.56 hari, Maret sebesar 1.39 hari, April sebesar 1.53 hari, dan Juni sebesar 1.33 hari apabila dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu Januari sebesar 1.22 hari, Februari sebesar 1.28 hari, Maret 1.31 hari, April 1.40 hari dan Juni 1.33 hari. Perbandingan rata-rata lama menginap tersebut dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut.

Gambar 3.4 Diagram Rata-rata lama tinggal wisatawan tahun 2020-2021 per bulan



Sumber: BPS Provinsi Kaltara, 2021

Tahun 2021, kontribusi PDRB sector pariwisata yang tercatat dalam kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1,66 triliun rupiah atau 1,51 persen. Sekitar 1,51 persen dari PDRB total merupakan kontribusi dari sub kategori penyediaan makan minum dan akomodasi.

Tabel 3.5 Peranan sub kategori terhadap nilai tambah kategori penyediaan akomodasi dan makan minum 2019-2021 (persen)

Lapangan Usaha		Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,87	16,48	16,34
B.	Pertambangan dan Penggalian	26,93	25,44	26,72
C.	Industri Pengolahan	9,20	9,15	8,97
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06

E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
F.	Konstruksi	13,74	14,27	13,68
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,01	12,19	12,49
H.	Transportasi dan Pergudangan	7,05	6,76	6,31
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,62	1,53	1,51
J.	Informasi dan Komunikasi	2,32	2,55	2,66
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,10	1,11	1,13
L.	Real Estat	0,77	0,76	0,74
M,N.	Jasa Perusahaan	0,22	0,23	0,22
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,96	4,95	4,69
P.	Jasa Pendidikan	2,44	2,58	2,55
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	1,13	1,14
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0,65	0,73	0,73
Produk	Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB menurut lapangan usaha 2019-2021, 2021

3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.3.1. Capaian sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri

Berdasarkan anggaran untuk pencapaian sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Capaian Anggaran untuk Sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENT ASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp 994,053,600.00	Rp 956,996,600.00	96,27%
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp 1,175,265,000.00	Rp 1,106,512,840.00	94,15%
TOTAL		Rp 2,169,318,600.00	Rp 2,063,509,440.00	95,21%

Sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri memiliki total anggaran sebesar Rp 2,169,318,600 dengan realisasi sebesar Rp 2,063,509,440 atau 95,21%. Adapun rincian program untuk menunjang sasaran ada 2 (dua) program, yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan anggaran Rp 994,053,600 dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan anggaran Rp 1,175,265,000.

Realisasi dari Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata yaitu sebesar Rp 956,996,600 atau 96,27%. Kemudian realisasi dari Program Pengembangan Destinasi Pariwisata yaitu sebesar 1,106,512,840 atau 94,15%.

3.3.2. Capaian Sasaran Rata-rata lama tinggal wisatawan

Berdasarkan anggaran untuk pencapaian sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Capaian Anggaran untuk Sasaran rata-rata lama tinggal wisatawan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RATA-RATA LAMA TINGGAL WISATAWAN	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp 1,032,252,850	Rp 986,798,065	95,60%
TOTAL		Rp 1,032,252,850	Rp 986,798,065	96,21%

Sasaran rata-rata lama tinggal wisatawan memiliki total anggaran sebesar Rp 1,032,252,850 dengan realisasi sebesar Rp 986,798,065 atau 96,21%. Rincian program untuk menunjang sasaran ada 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

3.3.3. Evaluasi dan Analisis Sasaran

Adapun upaya dari Dinas Pariwisata dalam mewujudkan sasaran dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana APBD

Provinsi Kalimantan Utara dan Dana Dekonsentrasi APBN Kementerian Pariwisata.

A. Program dan Kegiatan yang menunjang sasaran I dan sasaran II melalui APBD

Pengembangan pariwisata dalam mencapai sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara merupakan hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan identifikasi permasalahan yang menghambat pada tahun sebelumnya, selain faktor eksternal COVID – 19 dan dukungan infrastruktur jalan menuju obyek wisata belum maksimal, faktor internal yang menghambat peningkatan jumlah wisatawan di Kalimantan Utara yaitu:

1. Kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata masih rendah
2. Minimnya atraksi wisata di destinasi wisata
3. Rendahnya kualitas sadar wisata masyarakat terhadap pengembangan pariwisata

Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 yang mendukung sasaran I yaitu meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegaran dan sasaran 2 yaitu meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya destinasi wisata yang terbangun dan dikembangkan melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - a. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur destinasi wisata

Dalam meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur destinasi wisata dilakukan kegiatan perancangan dan perencanaan destinasi wisata Tanjung Cantik di Kabupaten Nunukan, perencanaan peningkatan Anjungan Kuliner di Tanjung Selor dan perancangan pembuatan gazebo di destinasi Kawasan Konservasi Mangrove dan

Bekantan (KKMB) di Kota Tarakan serta Studi Kelayakan destinasi wisata di Kawasan Karang Malingkit, Kabupaten Bulungan.

Sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi wisata dilakukan pada destinasi KKMB Kota Tarakan berupa rehab jembatan yang rapuh serta pelukisan mural dilantai, selain itu dilakukan juga pengukiran cap motif dan pengecatan Siring dan Kuliner Tepian Kayan Tanjung Selor. Untuk meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana destinasi wisata pula terdapat kegiatan berupa hibah di Embung Persemaian, Kota Tarakan.

- b. Terlaksananya pembinaan terhadap masyarakat untuk sadar wisata melalui pelatihan dan sosialisasi sadar wisata yang dilaksanakan bagi masyarakat.

Sosialisasi sadar wisata penting bagi masyarakat mengingat dasar kepeahaman tentang kepariwisataan dapat menumbuhkan motivasi dan partisipasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan desa wisata. Adapun kegiatan yang mendukung hal tersebut adalah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata dengan tema “Menggalang Potensi Desa Wisata sebagai Destinasi Wisata berbasis Alam dan Budaya” di Desa Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau.

- c. Memperluas jaringan pemasaran dan promosi pariwisata melalui Program Pemasaran Pariwisata

Jumlah pengguna internet semakin tinggi setiap tahunnya, tak terkecuali di Kalimantan Utara. Kebanyakan wisatawan menggunakan teknologi search and research ketika hendak mengunjungi obyek wisata. Oleh karenanya Dinas Pariwisata menggunakan platform media sosial untuk membagikan informasi ataupun konten pariwisata Kalimantan Utara baik melalui website, Facebook maupun Instagram yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kalimantan Utara yang dapat diakses oleh siapapun. Media sosial merupakan alat pemasaran dalam lingkup pemasaran digital untuk membangun, menjalin engagement

atau meningkatkan interaksi dengan masyarakat lokal maupun wisatawan dari berbagai asal daerah melalui intensitas dalam berbagi informasi mengenai obyek wisata terutama pada obyek wisata yang belum banyak dikenal masyarakat ataupun pelaksanaan kegiatan event dan festival yang diadakan di Kalimantan Utara sehingga menciptakan hype/buzz pada destinasi wisata tersebut atau dengan kata lain menjadi ramai diperbincangkan dimasyarakat.

Selain melalui platform media sosial, fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata juga dilakukan berupa dukungan kegiatan pada kegiatan sebagai berikut:

- Kaltara Berseni yaitu lomba lukis design mural kearifan lokal (Bulungan)
- South Borneo BMW Enthusiast (SBBE)
- Festival Aco Lundayeh ke 2 (Nunukan)
- Jelajah Kaltara Road to Sebatik (Sebatik)
- Lomba Foto Kaltara (Bulungan)
- Musik Alam Fest 2k21 (Bulungan)
- Bulungan Sutanate Festival (Bulungan)

Pelaksanaan dukungan kegiatan daerah juga dilakukan pada event yang masuk dalam Top Event Kharisma Kemenparekraf. Mengingat kegiatan beberapa event terdampak dalam pelaksanaannya, baik adanya kebijakan pemerintah mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengurangi mobilitas masyarakat. Pelaksanaan event menerapkan CHSE yang ketat. CHSE adalah program Kemenparekraf yang berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan).

Situs lokasi yang digunakan sebagai titik penyelenggaraan suatu acara dibedakan menjadi tiga zona, yang pertama zona hijau berarti acara dapat diselenggarakan secara hybrid atau campuran antara online dan

offline, sedangkan zona merah berarti acara hanya dapat dilaksanakan secara virtual.

Pelaksanaan kegiatan Calendar of Event (CoE) Kalimantan Utara merupakan bentuk bangkitnya pariwisata dan industri kreatif di Kalimantan Utara khususnya event dengan melibatkan komunitas, pemuda/i daerah, event organizer melalui Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan event/kegiatan daerah tahun 2022 unggulan masing-masing dan melalui proses presentasi oleh penyelenggara dan akan diseleksi oleh kurator yang berkompeten sehingga menjadikan event ini sebagai salah satu sarana untuk mendorong daerah kabupaten dan kota dalam menyelenggarakan kegiatan berkualitas dan konsisten dalam pelaksanaannya.

Hasil dari kegiatan ini, Top 10 Calendar of Event Kaltara 2022 dari 35 event yang telah didaftarkan baik dari pariwisata kabupaten/kota maupun para komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan Utara, yakni:

1. Cap Go Meh (Kabupaten Bulungan) di bulan Februari
2. Aco Lundayeh (Kabupaten Nunukan) di bulan April
3. Pesta Rakyat (Kabupaten Tana Tidung) di bulan Agustus
4. Musik Alam Fest (Kabupaten Bulungan) di bulan September
5. Birau Bulungan (Kabupaten Bulungan) di bulan Oktober
6. Kaltara Begimpor (Kabupaten Bulungan) di bulan Oktober
7. Irau Malinau (Kabupaten Malinau) di bulan Oktober
8. Kaltara Motofest (Kabupaten Bulungan) di bulan Oktober
9. Gelar Budaya Adat Dumud (Kota Tarakan) di bulan Oktober
10. Irau Tengkeyu (Kota Tarakan) di bulan Desember

Disamping meningkatkan promosi pariwisata baik dalam dan luar negeri, program ini juga memiliki kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi kreatif yang dilakukan melalui lomba dan

workshop “Kaltara Menyeduh” dengan tema “Kopi Kaltara Maju, Petani Sejahtera”. Workshop Kaltara Menyeduh 2021 merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada industri kreatif kopi yang sedang merebak dan populer. Kegiatan ini juga menjadi jembatan penghubung antara petani kopi dan pelaku industri kreatif kopi, baik itu café atau kedai kopi dalam memajukan industri kreatif kopi di Kalimantan Utara serta menjadi ajang pengembangan potensi dan kemampuan menyeduh bagi barista-barista di Kalimantan Utara dan sekitarnya.

Selain itu diadakan pula kegiatan Pelatihan Phone Photography dan Periklanan di Tanah Kuning dengan harapan terlatihnya pengusaha pemula dan mandiri dalam pemasaran dan promosi hasil produk kreatif yang mereka miliki sehingga berdampak dalam peningkatan penjualan dan perekonomian masyarakat.

B. Program dan Kegiatan yang menunjang sasaran III melalui APBD

Pada sasaran strategis meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan dengan indikator tingkat rata-rata lama tinggal wisatawan tidak optimal tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dimana target tahun 2021 adalah sebanyak 1.45 hari namun yang terealisasi sebesar 1.35 hari sehingga capaiannya sebesar 91% dengan kategori capaian baik.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kalimantan Utara yaitu melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan dengan melakukan pelatihan dan rapat koordinasi yaitu:

1. Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan bidang Pariwisata Subsektor Hotel dan Restoran, Pemandu Wisata, Pemimpin Perjalanan Wisata di Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan

2. Fasilitasi Peningkatan SDM Pemandu Ekowisata di Long Beluah, Tanjung Palas Tengah

3. Rapat Koordinasi Bidang Industri, Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Tarakan dengan peserta yang terdiri dari perwakilan masing-masing kabupaten/kota, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kalimantan Utara, pelaku ekonomi kreatif, pengurus International Hotel and General Manager Association (IHGMA) Kalimantan Utara dan Pengurus PHRI Kalimantan Utara dan Kota Tarakan.

4. Sosialisasi Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata Tingkat Lanjutan di Kota Tarakan dan Tanjung Selor

5. Bimbingan Teknis Sertifikasi bagi Pemandu Wisata di Kota Tarakan

6. Lomba Video Pendek dengan tema “Menggali Potensi Memajukan Pariwisata Kalimantan Utara”

7. Fasilitasi Uji Sertifikasi Kompetensi sub sektor Pemandu Wisata di Tanjung Selor

11. Evaluasi dan Analisis Sasaran

Beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Masih diberlakukan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.
2. Karena adanya penetapan PSBB secara besar-besaran di setiap daerah maupun kota sehingga adanya pengalihan lokasi kegiatan bahkan penundaan kegiatan.
3. Pada tahun ini berdasarkan surat edaran dari kemenparekraf /banparekraf pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di setiap provinsi ditiadakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19. Pada sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif merupakan yang terkena dampak paling besar oleh pandemi ini. Banyak usaha-usaha wisata ditutup sementara maupun pailit bahkan hal ini berdampak juga ke

pelaku usaha yang mengalami kerugian besar dan banyak pekerja wisata kehilangan pekerjaan dan pendapatannya.

4. Data capaian kinerja yaitu jumlah wisatawan mancanegara Provinsi Kalimantan Utara masih belum kembali normal tetapi sudah cukup baik.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas ada beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu:

1. Melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dan menunda beberapa kegiatan yang tidak bersifat prioritas.
2. Melakukan monitoring, evaluasi, dan mendata seluruh sektor usaha pariwisata maupun tenaga kerja pada bidang pariwisata yang terkena dampak secara langsung oleh pandemi. Dengan bekerja sama dengan OPD lainnya untuk meninjau lapangan maupun memberikan bantuan berupa bimbingan ataupun bantuan kerjasama dengan stakeholder lainnya dalam penanganan.
3. Menyusun perencanaan yang lebih efektif dan efisien pada tahun selanjutnya, serta menimbang untuk penanganan pasca pandemi COVID-19 atau masa pemulihan.
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi internal Dinas Pariwisata dan dengan instansi terkait lainnya tentang pelaksanaan kegiatan.
5. Membuat Standar Operasional Prosedur yang tepat dan sesuai dengan tugas serta fungsinya.

12. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa dari sasaran yang ada indikator kinerja tercapai atau lebih dari 100% dan capaian realisasi keuangan rata-rata mencapai 86,94% (kurang dari 100%). Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang cukup tinggi, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri	Persentase peningkatan wisatawan	100%	86,94%	13,06%
----	--	----------------------------------	------	--------	--------

3.4. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 10.967.995.866,00 untuk APBD Murni. Kemudian pada Triwulan II, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara mengalami refocusing anggaran sehingga jumlah APBD yang dimiliki menjadi Rp. 10.314.082.866,00. Pada Triwulan IV, terdapat perubahan anggaran sehingga APBD-P Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 15.456.728.632,00. Adapun rincian Program/Kegiatan, pagu anggaran dan realisasi APBD Perubahan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Tahun 2021

N O	KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	BOB OT	REALISASI					SISA ANGGARAN
					FISIK		KEUANGAN			
					FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KE U. (%)	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.645.509.144,00	42,99	90,32	39,12	5.811.230.521,00	87,45	37,55	834.278.623,00
1	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.317.700,00	0,22	79,50	0,18	6.822.000,00	19,88	-	27.495.700,00
1	3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.180.000,00	0,04	100,00	0,04	-	-	-	6.180.000,00
2	3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.137.700,00	0,18	75,00	0,14	6.822.000,00	24,25	0,04	21.315.700,00
2	3.26.01.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.503.085.892,00	35,60	90,84	32,34	4.836.505.183,00	87,89	31,29	666.580.709,00
1	3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.111.375.892,00	33,07	90,24	29,84	4.504.235.183,00	88,12	29,14	607.140.709,00
2	3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	391.710.000,00	2,53	98,70	2,50	332.270.000,00	84,83	2,15	59.440.000,00

3	3.26.0 1.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	24.000.000,0 0	0,16	100,00	0,16	22.500.000,00	93,7 5	0,15	1.500.000,00
1	3.26.01 .1.05.0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000,00	0,16	100,00	0,16	22.500.000,00	93,7 5	0,15	1.500.000,00
4	3.26.0 1.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	484.813.512,00	3,14	94,28	2,96	439.160.649,00	90,5 8	2,84	45.652.863,00
1	3.26.01 .1.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.802.758,00	0,01	100,00	0,01	1.802.758,00	100, 00	0,01	-
2	3.26.01 .1.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.819.921,00	0,52	100,00	0,52	73.111.000,00	91,5 9	0,47	6.708.921,00
3	3.26.01 .1.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.505.717,00	0,02	78,69	0,02	2.908.800,00	82,9 7	0,02	596.917,00
4	3.26.01 .1.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.614.966,00	0,85	90,72	0,77	108.367.778,00	82,3 4	0,70	23.247.188,00
5	3.26.01 .1.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.895.750,00	0,32	71,32	0,23	39.733.000,00	81,2 6	0,26	9.162.750,00
6	3.26.01 .1.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.016.000,00	0,03	85,00	0,03	3.600.000,00	71,77	0,02	1.416.000,00

7	3.26.01 .1.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.562.400,00	0,06	100,00	0,06	7.715.524,00	90,11	0,05	846.876,00
8	3.26.01 .1.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.596.000,00	1,33	100,00	1,33	201.921.789,00	98,21	1,31	3.674.211,00
5	3.26.0 1.1.07	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	29.796.800,00	0,19	100,00	0,19	29.480.000,00	98,94	0,19	316.800,00
1	3.26.01 .1.07.0 5	Pengadaan Mebel	29.796.800,00	0,19	100,00	0,19	29.480.000,00	98,94	0,19	316.800,00
6	3.26.0 1.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	375.344.400,00	2,43	96,13	2,33	356.234.390,00	94,91	2,30	19.110.010,00
1	3.26.01 .1.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.585.000,00	0,04	98,48	0,04	6.198.000,00	94,12	0,04	387.000,00
2	3.26.01 .1.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.481.000,00	0,05	95,00	0,05	7.250.000,00	85,49	0,05	1.231.000,00
3	3.26.01 .1.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.278.400,00	2,33	96,11	2,24	342.786.390,00	95,14	2,22	17.492.010,00
7	3.26.0 1.1.09	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	194.150.840,00	1,26	66,08	0,96	120.528.299,00	62,08	0,78	73.622.541,00

1	3.26.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.150.840,00	1,06	78,16	0,83	101.078.299,00	61,58	0,65	63.072.541,00
2	3.26.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	0,19	66,67	0,13	19.450.000,00	64,83	0,13	10.550.000,00
B	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.766.385.910,00	17,90	97,02	17,37	2.396.723.072,00	86,64	15,51	369.662.838,00
1	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	616.434.674,00	3,99	94,59	3,77	541.111.747,00	87,78	3,50	75.322.927,00
1	3.26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	178.727.273,00	1,16	100,00	1,16	171.462.000,00	95,93	1,11	7.265.273,00
2	3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	367.510.000,00	2,38	92,50	2,20	305.229.000,00	83,05	1,97	62.281.000,00
3	3.26.02.1.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	70.197.401,00	0,45	91,77	0,42	64.420.747,00	91,77	0,42	5.776.654,00
2	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.627.710.000,00	10,53	99,58	10,49	1.407.344.500,00	86,46	9,11	220.365.500,00
1	3.26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.627.710.000,00	10,53	99,58	10,49	1.407.344.500,00	86,46	9,11	220.365.500,00

3	3.26.0 2.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	522.241.236,00	3,38	91,94	3,11	448.266.825,00	85,8 4	2,90	73.974.411,00
1	3.26.0 2.1.03. 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100.169.520,00	0,65	93,33	0,60	60.327.000,00	60,2 2	0,39	39.842.520,00
2	3.26.0 2.1.03. 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	273.589.000,0 0	1,77	93,54	1,66	250.095.200,00	91,41	1,62	23.493.800,00
3	3.26.0 2.1.03. 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	148.482.716,00	0,96	88,06	0,85	137.844.625,00	92,8 4	0,89	10.638.091,00
C	3.26.0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.445.665.310, 00	28,76	98,88	28,44	4.328.842.124,0 0	97,3 7	28,01	116.823.186,00
1	3.26.0 3.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4.445.665.310, 00	28,76	98,88	28,44	4.328.842.124,0 0	97,3 7	28,01	116.823.186,00
1	3.26.0 3.1.01.0 1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	151.559.560,00	0,98	100,00	0,98	148.893.565,00	98,2 4	0,96	2.665.995,00
2	3.26.0 3.1.01.0 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	898.729.600,0 0	5,81	97,59	5,67	856.859.900,00	95,3 4	5,54	41.869.700,00
3	3.26.0 3.1.01.0 3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	3.160.751.150,0 0	20,45	100,00	20,45	3.135.684.020,0 0	99,2 1	20,29	25.067.130,00

4	3.26.0 3.1.01.0 4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	234.625.000,0 0	1,52	88,06	1,34	187.404.639,00	79,8 7	1,21	47.220.361,00
D	3.26.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	395.421.707,00	2,56	83,02	2,124	312.833.479,00	79,11	2,02	82.588.228,00
1	3.26.0 4.1.01	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</i>	395.421.707,00	2,56	83,02	2,124	312.833.479,00	79,11	2,02	82.588.228,00
1	3.26.0 4.1.01. 01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	99.900.475,00	0,65	91,67	0,59	87.376.779,00	87,4 6	0,57	12.523.696,00
2	3.26.0 4.1.01. 02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	44.930.000,00	0,29	100,00	0,29	37.181.400,00	82,7 5	0,24	7.748.600,00
3	3.26.0 4.1.01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	50.592.042,00	0,33	-	-	-	-	-	50.592.042,00
4	3.26.0 4.1.01. 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	199.999.190,00	1,29	95,89	1,24	188.275.300,00	94,1 4	1,22	11.723.890,00
D	3.26.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.203.746.561, 00	7,79	87,54	6,82	964.898.945,00	80,1 6	6,24	238.847.616,00

1	3.26.0 5.1.01	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</i>	1.203.746.561,00	7,79	87,54	6,82	964.898.945,00	80,16	6,24	238.847.616,00
1	3.26.0 5.1.01.0 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	286.045.220,00	1,85	83,04	1,54	184.928.945,00	64,65	1,20	101.116.275,00
2	3.26.0 5.1.01.0 2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	349.708.378,00	2,26	88,33	2,00	314.230.500,00	89,86	2,03	35.477.878,00
3	3.26.0 5.1.01.0 3	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	153.570.513,00	0,99	93,01	0,92	108.652.500,00	70,75	0,70	44.918.013,00
4	3.26.0 5.1.01.0 4	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	199.144.432,00	1,29	90,89	1,17	176.329.500,00	88,54	1,14	22.814.932,00
5	3.26.0 5.1.01.0 7	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	49.735.000,00	0,32	64,06	0,21	31.860.000,00	64,06	0,21	17.875.000,00
6	3.26.0 5.1.01.0 8	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	65.762.120,00	0,43	98,44	0,42	63.970.000,00	97,27	0,41	1.792.120,00
7	3.26.0 5.1.01.0 9	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.780.898,00	0,65	87,05	0,56	84.927.500,00	85,11	0,55	14.853.398,00
JUMLAH			15.456.728.632,00	100,00	93,58	93,86	13.814.528.141,00	89,38	89,33	1.642.200.491,00

BAB IV PENUTUP

Pada tahun anggaran 2021, program dan kegiatan pada APBD Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara dapat terlaksana dengan baik dengan rata-rata capaian kinerja dari seluruh program berada pada angka 93.06% dan anggaran sebesar 89.38%. Kemudian jumlah wisatawan sebesar 653.922 kunjungan yang terdiri dari 334.021 wisatawan mancanegara dan 319.901 wisatawan nusantara dengan rata-rata lama menginap wisatawan adalah sebesar 1.35 hari. Berdasarkan data yang ada, jumlah wisatawan meningkat dari tahun 2020 sebesar 653.594 menjadi 653.922 kunjungan. Akan tetapi jika dikategorikan secara wisman dan wisnus, maka pada wisatawan mancanegara mengalami penurunan jumlah menyebabkan realisasi target pertumbuhan wisatawan mancanegara sebesar -18%. Sedangkan realisasi target pertumbuhan wisatawan nusantara melebihi dari target 10% yaitu sebesar 51%. Untuk rata-rata lama tinggal wisatawan mengalami penurunan karena rata-rata lama tinggal wisatawan pada tahun 2020 sebesar 1.45 hari sedangkan rata-rata lama tinggal wisatawan sebesar tahun 2021 sebesar 1.35 hari.

Pada tahun 2021, kasus Pandemi COVID-19 semakin meningkat baik secara nasional maupun di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut berdampak pada seluruh aspek di daerah membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengambil kebijakan penundaan sementara kegiatan sesuai dengan Surat Gubernur dengan nomor surat 100/694/GUB mengenai Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan Kontrak Tahun Anggaran 2021 serta adanya arahan akan refocusing anggaran berdasarkan surat dari BPKAD dengan nomor surat 900/0857/BPKAD/SETDA dalam rangka mendukung penanganan COVID-19 dan dampaknya. Penetapan refocusing anggaran terjadi pada Triwulan II. Selain situasi diatas, kondisi pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan adanya PPKM yang membatasi mobilitas sehingga beberapa tahapan persiapan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda dan menghambat pelaksanaan kegiatan program.

Dengan segala keterbatasan yang ada pada tahun 2021, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara telah berusaha maksimal agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan pencapaian yang

telah disampaikan, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama terutama dalam menghadapi tantangan situasi pandemi. Penyelenggaraan pembangunan tetap dilaksanakan dengan optimisme yang baik seiring dengan percepatan penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID – 19 yang berlangsung.

Mengutip dari pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, dalam menghadapi perubahan besar (megashift) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akibat pandemi COVID – 19 adalah dengan mengimplementasikan tiga kunci aspek yaitu inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Diharapkan kedepannya pariwisata dapat mengoptimalkan aspek inovasi pemanfaatan platform digital, aspek adaptasi dalam menerapkan protokol kesehatan di era kenormalan baru dan aspek kolaborasi yakni bekerjasama dengan seluruh unsur pentahelix sehingga pemulihan dan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat segera terwujud.

Demikian LKjIP Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok, fungsi dan strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara sebagai perwujudan dari visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah. Akhir kata, semoga laporan ini dalam memberikan gambaran bagaimana perkembangan pariwisata Provinsi Kalimantan Utara dan acuan untuk menindaklanjuti kebutuhan kemajuan pada tahun depan.